

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, Juli 2023, Halaman 374-378
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8126088>

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Bimbingan Konseling di SMP Muhammadiyah 57 Medan

Adinda Alvina Wahyuni¹, Yenti Arsini², Ayu Rahmawati Siregar³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: adindaw153@gmail.com¹, yentiarsini73@gmail.com², ayurahmawatisiregar@gmail.com³

Abstrak

The purpose of this research is to find out what are the inhibiting factors for the implementation of the Counseling Guidance program at Muhammadiyah 57 Middle School Medan. The approach to this study uses qualitative descriptive research and the type of research is case study. Data collection is by interview. Data analysis techniques in this research use miles and huberman with data reduction models, presentations, and concluded the results of the study. Respondents in this study were guidance counseling teachers at Muhammadiyah 57 Middle School Medan.

Keywords: *Inhibiting factors, Counseling, Muhammadiyah 57 Middle School*

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna mendapatkan informasi mengenai apa saja yang menyebabkan faktor penghambat pelaksanaan program Bimbingan Konseling di SMP Muhammadiyah 57 Medan. Pada penelitian ini peneliti memakai pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Pengumpulan data dengan wawancara. Teknik analisis data pada penelitian ini memakai miles and huberman dengan model reduksi data, presentasi, dan menyimpulkan hasil penelitian. Responden untuk penelitian ini adalah guru BK di SMP Muhammadiyah 57 Medan. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya faktor penghambat pelaksanaan program bimbingan konseling di SMP Muhammadiyah 57 Medan. Adapun faktor penghambatnya yaitu tidak adanya ruangan BK dan jumlah guru BK tidak sebanding dengan jumlah siswa

Kata Kunci: *Faktor penghambat, konseling, SMP Muhammadiyah 57 Medan*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.111 Tahun 2014 pasal 10 ayat 2 yang berisi: Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada SMP / MTs atau yang sederajat, SMA / MA atau yang sederajat dan SMK / MAK atau yang sederajat dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan rasio satu konselor atau guru bimbingan dan konseling melayani 150 konseli atau peserta didik.

Sehingga tugas dan tanggung jawab guru BK ataupun konselor berbeda tugasnya dengan guru bidang studi ataupun wali kelas. Adapun beban tugas guru BK (Sukardi, 2008) yaitu :

- 1) Pelaksanaan penyelenggaraan program bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir dan berbagai ragam layanan, yang tergolong juga kegiatan pendukung.
- 2) Dalam pelaksanaan melakukan penyelenggaraan layanan dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir dan ragam layanan lainnya termasuk juga kegiatan pendukung.

3) Dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pelayanan dalam bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, serta berbagai macam layanan termasuk kegiatan pendukung.

Dalam melaksanakan program bimbingan haruslah diperhatikan aspek - aspek yang dianggap penting dalam melaksanakan program bimbingan. Adapun hal terpenting tersebut (Aqib, 2012) :

- 1) Program bimbingan haruslah didasarkan pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik.
- 2) Program bimbingan haruslah program yang terstruktur untuk semua program pendidikan di sekolah.
- 3) Masing - masing bimbingan memiliki kapasitas yang setara dengan sifat dan kemampuan fungsional di sekolah.
- 4) Kepala sekolah ialah individu yang memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan program bimbingan di sekolah.
- 5) Pengorganisasian program bimbingan dilakukan secara sederhana.
- 6) Diperlukan adanya organisasi vertikal yang sesuai.

Berdasarkan penelitian Sari, dkk (2013) terdapat sejumlah guru pembimbing yang tidak menyusun program sesuai dengan kebutuhan klien atau peserta didik. Jadi aktivitas pelaksanaan program tidak sesuai dengan program yang disusun. Ada sebabnya mengapa program BK yang telah direncanakan tidak menjadi dasar penyelenggaraan program BK, karena program yang disusun hanya disebabkan oleh keperluan administrasi , program tidak disusun dengan analisis yang teliti, program juga tidak disusun sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi siswa dan program yang disusun juga tidak melihat keadaan sekolah.

KAJIAN TEORITIS

Program Bimbingan dan Konseling

Winkel (2004) berpendapat bahwa program BK dapat diartikan sebagai suatu acuan atau dasar kegiatan BK yang terstruktur dan terorganisasi serta tekoordinasi untuk jangka waktu tertentu. Persepsi Giyono (2010) bahwa program BK yaitu kegiatan keseluruhan program BK yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu yaitu jangka waktu bulanan, semester dan tahunan.

Sehingga dari pendapat para ahli tersebut bisa kita simpulkan bahwa program BK adalah seluruh hal pelaksanaan yang direncanakan yang sesuai dengan kondisi siswa. Yang mana dilaksanakan untuk jangka periode tertentu seperti bulanan, semestertan dan tahunan.

Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling

Menurut Giyono (2010) ada aspek – aspek pokok yang semestinya ada dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling yaitu :

a. Prinsip pencatatan administrasi program BK.

Ketika menyusun dan menjalankan admnistrasi program BK di sekolah hendaknya memperhatikan unsur pokok seperti :

- (1)Program BK haruslah disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
- (2)Program BK hendaklah menjadi program yang terpadu, yang mana pelaksanaannya juga terkordinasi dengan sekolah lainnya.
- (3)Semua petugas BK memiliki tanggung jawab dan peran masing – masing sesuai dengan kemampuan fungsional sekolahnya.
- (4)Penyelenggaraan program BK berada ditangan kepala sekolah.

b. Bentuk organisasi BK

Terdapat tiga pola yang dilaksanakan yaitu :

- (1) Bentuk organisasi, yang mana penyelenggaraan layanan BK dikerjakan oleh seluruh staf sekolah sebagai tugas regulernya.
- (2) Bentuk organisasi yang mana program BK dilakukan dengan lebih teliti, disiapkan jam khusus dalam pelaksanaan layanan bimbingan yang sama dengan pelayanan eksklusif pula.
- (3) Bentuk organisasi gabungan dengan pola pertama dan kedua yang disebut dengan program guru penyuluhan.

Menurut Kartini Kartono (1985) adapun indikator dari faktor – faktor yang membuat penyebab penghambat pelaksanaan program BK disebabkan oleh :

- 1) Perhitungan, pengetahuan dan dugaan perencanaan yang berkaitan melalui faktor – faktor yang perlu diperimbangkan ketika membuat program (mengetahui masalah peserta didik, dan sumber dari persoalan tersebut) dan isi program bk itu sendiri.
- 2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan BK.
- 3) Pendidikan petugas yang sesuai
- 4) Prinsip petugas BK, petugas BK memiliki kontribusi yang setara dengan sifat dan kemampuan fungsional disekolah (guru mata pelajaran, staf administrasi, wali kelas, dan kepala sekolah).

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Studi kasus yaitu rangkaian kegiatan penelitian bersifat alamiah yang dilakukan dengan cara intens, terperinci dan meluas terhadap suatu program, kejadian dan aktivitas yang mana untuk individu, sekumpulan individu, lembaga atau organisasi untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terhadap peristiwa tersebut (Rahardjo, 2017). Kegiatan penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 57 Medan. Pada penelitian ini, peneliti menggumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara. Sementara itu, untuk analisi data yang telah terkumpul maka peneliti menggunakan model analisa miles huberman yaitu penghimpunan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 57 Medan dengan melibatkan guru bk di sekolah tersebut. Penelitian dilaksanakan berupa wawancara terhadap guru BK di SMP Muhammadiyah 57 Medan. Wawancara dilakukan secara struktur dengan pedoman wawancara dengan beberapa indikator sebagai berikut:

No	Indikator
1	Landasan penyusunan program dan isi program
2	Sarana dan prasarana
3	Pendidikan petugas yang sesuai
4	Petugas BK memiliki tanggungjawab yang sebanding dengan fungsi dengan sifat dan kesanggupan fungsional di sekolah (guru mata pelajaran, staf administrasi, wali kelas, dan kepala sekolah)

Mengenai deskripsi yang berkaitan indikator faktor penghambat pelaksanaan program bk disekolah yaitu :

1. Landasan penyusunan dan isi program bimbingan dan konseling

Prayitno (1998) berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam penyusunan program BK yaitu : (1) Program BK haruslah disusun berdasarkan permasalahan peserta didik, (2) Program BK haruslah mempunyai tujuan yang ideal, (3) Dalam penyusunan program BK

hendaklah melibatkan semua tenaga pendidik yang ada disekolah, (4) Dalam penyusunan program BK haruslah disusun dengan sistematis, bersifat menyeluruh, terbuka, dan luwes, (5) Memiliki kontribusi dalam mengkolaborasikan sekolah dengan masyarakat yang ada disekitar sekolah. Dalam hal ini yang menjadi hambatannya yaitu kurangnya personil BK dalam memahami kebutuhan peserta didik, dikarenakan jumlah guru BK di sekolah tersebut tidak sesuai dengan jumlah siswanya.

2. Sarana dan Prasarana

Menurut Giyono (2010) agar program BK berlangsung dengan lancar maka, haruslah adanya perencanaan biaya yang memadai untuk pos – pos personal, pengadaan dan penambahan alat – alat teknis / instrumenasi, biaya operasional, dll. Sehingga untuk menyelenggarakan program BK haruslah adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan program tersebut. Dalam hal sarana dan prasarna yang menjadi hambatannya yaitu tidak adanya ruang BK untuk sementara ini, dikarenakan sedang dalam proses pembangunan untuk ruang BK, tetapi untuk sementara ini tidak ada ruang BK begitu juga dengan kurangnya biaya.

3. Latar Belakang Pendidikan Petugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 yaitu “*Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidika yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi dibidang Bimbingan dan Konseling.*” Untuk guru BK di SMP Muhammadiyah 57 Medan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan PERMENDIKBUD No.11 Tahun 2014.

4. Petugas BK memiliki tanggungjawab yang sebanding dengan fungsi dengan sifat dan kemampuan fungsional di sekolah (guru mata pelajaran, staf administrasi, wali kelas, dan kepala sekolah).

Ketika melaksanakan program BK tidaklah bisa melaksanakan semuanya sendiri. Hal tersebut haruslah dibantu dengan pihak lain yang berada disekolah, agar program yang dijalankan berjalan dengan lancar. Dalam hal ini personil sekolah cukup membantu dalam mengentaskan masalah siswa. Tetapi tetap saja dibutuhkan guru BK tambahan agar program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan klien atau peserta didik.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah kami analisis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan program BK di SMP Muhamadiyah 57 Medan yaitu tidak adanya ruang BK walaupun dalam tahap pembangunan tidak ada ruang BK sementara untuk melakukan kegiatan konseling dan juga masalah biaya operasional tidak adanya pengadaan dan pengembangan alat instrumen. Lalu jumlah guru BK yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut.

SARAN

Kepada Kepala Sekolah hendaknya menambahkan guru BK yang profesional agar pelaksanaan program BK dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Referensi

- Giyono. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. FKIP Universitas Lampung.
Kartono, Kartini. 1985. *Bimbingan dan Dasar – Dasar Pelaksanaannya*. Jakarta : CV. Rajawali
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014
Prayitno & Erman Amti. 1999. *Dasar – Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : Rineka Cipta

- Rahardjo, Mudjia.2017.*Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep dan Prosedurnya*.<http://repository.UINMalang.ac.id//1104/1/studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif>
- Sari, E.R, dkk.2013.*Faktor Penghambatan Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling : Jurnal Bimbingan Konseling*.2(4). 2 – 13.
- Winkel, W.S.2004.*Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*.Yogyakarta : Media Abadi